

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Di era globalisasi pengejaran pertumbuhan merupakan tema sentral dalam ekonomi semua negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dan merupakan anggota ASEAN dengan kekuatan ekonomi global di Asia. Indonesia terus mendapatkan pemberitaan yang positif. Pemberitaan tersebut mencerminkan ketahanan Indonesia dalam menghadapi krisis keuangan global, meningkatkan angka penilaian terhadap pemerintahan dan kredit eksternal, juga kemampuannya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul akibat perubahan-perubahan yang terjadi di panggung politik dalam negeri¹.

Sebagai praktek pemerintahan yang baru, kerjasama luar negeri atau yang disebut dengan paradiplomasi di Indonesia memerlukan kebijakan umum atau semacam '*master plan*', yang dapat menjadi '*guidance*' bagi daerah untuk melaksanakan kerjasama luar negeri. Pemerintah pusat melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri perlu mengarahkan orientasi kerja sama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sebab dalam praktek selama ini, pemerintah daerah terlalu leluasa menentukan partner kerja sama dengan pihak atau negara asing, sehingga sering nilai kemanfaatannya kurang jelas, dan kurang mendukung kebijakan makro hubungan luar negeri secara nasional, misalnya,

¹ http://www.bkpm.go.id/contents/general/4/perekonomian-yang-sehat#.VBaYz6PYN_g, Perekonomian yang Sehat, diakses pada tanggal 15 september 2014.

kebijakan pasar bebas. Master plan nasional itu sebagai arahan bagi daerah dalam melakukan kerja sama dengan pihak asing, misalnya dengan pemerintah local asing di negara-negara yang Pemerintah RI terkait dalam persetujuan *Free Trade Area*, atau secara khusus dengan negara-negara ASEAN, dan dengan negara-negara prioritas lainnya seperti Jepang, Germany, Australia, New Zealand, South Korea dan Saudi Arabia².

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada masing-masing kepala daerah tingkat kabupaten dan provinsi di seluruh Indonesia untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah dan masyarakat di suatu daerah memiliki peranan yang penting dalam peningkatan kualitas pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini terutama disebabkan karena dalam otonomi daerah terjadi peralihan kewenangan yang pada awalnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat kini menjadi urusan pemerintahan daerah masing-masing.

Meskipun demikian, beberapa daerah-daerah di Indonesia masih mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah. Salah satu penyebab rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah di Indonesia adalah kelangkaan modal dan untuk memperoleh modal, pemerintah berusaha menarik pihak-pihak asing untuk mengalihkan dan mengembangkan usaha ke beberapa daerah di Indonesia.

² Mukti, Takdir Ali, *Paradiplomacy; Kerjasama Luar Negeri oleh Pemda di Indonesia*, hal. 345-347, Yogyakarta, 2013

Modal merupakan salah satu prasyarat pertumbuhan ekonomi. Menurut Paul Krugman, dalam tesisnya menggambarkan bahwa angka pertumbuhan perekonomian Asia yang menakjubkan sebetulnya didorong oleh masuknya modal asing. Negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia biasanya memiliki problem besar berkenaan dengan kelangkaan modal pembangunan. Artinya, jika Indonesia ingin meraih kembali pertumbuhan ekonominya, harus berupaya menarik modal asing³.

Untuk mendorong peningkatan investasi di Indonesia Pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai kebijakan yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang ini mengisyaratkan adanya reformasi birokrasi dalam pelayanan investasi yaitu diterapkannya sistem pelayanan perizinan terpadu satu pintu, untuk dapat memberikan pelayanan perizinan yang lebih cepat, mudah dan murah yang mengakomodasi dengan tuntutan dunia usaha.

Jambi merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang dibentuk pada tanggal 2 Juli 1958. Setelah Jambi menjadi provinsi, rakyat dan pemerintah Jambi mulai menata administrasi pemerintahannya. Jambi mulai dapat melakukan pembangunan. Kemajuan pembangunan Jambi mulai terlihat pada tahun 1968-1974. Selanjutnya Jambi terus melakukan pembangunan seiring dengan program pembangunan yang dicanangkan pemerintah pusat⁴. Provinsi Jambi memiliki kekayaan budaya yang beraneka ragam dalam bentuk adat istiadat, tradisi,

³ Jatmika, Sidik, *Otonomi Daerah; Perspektif Hubungan Internasional*, Yogyakarta, 2001, hal. 77

⁴ <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbtanjungpinang/2014/06/08/sejarah-jambi-1855-1950/>, (Balai Pelestarian Nilai Budaya Tanjung Pinang, (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia)), Sejarah Jambi 1855-1950, diakses pada 18 September 2014

kesenian, dan Bahasa. Masyarakat Jambi terdiri atas berbagai suku, antara lain Melayu, Kerinci, Bugis, Banjar, Jawa, Sunda, dan Kubu yang masing-masing memiliki kebudayaan dan adat istiadatnya sendiri.

Jambi memiliki potensi pariwisata cukup beragam, seperti wisata alam, budaya, dan sejarah. Namun, semuanya itu hingga sekarang belum berkembang seperti yang diharapkan oleh banyak orang.

Posisi daerah Jambi sebenarnya strategis karena berdekatan dengan Riau, yang juga berarti dekat dengan pengembangan regional segitiga pertumbuhan Singapura-Johor-Riau (Sijori). Kerjasama regional ini masih dimungkinkan bagi Jambi. Kerjasama ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan potensi pertanian, kehutanan, pertambangan, industri, pariwisata, perikanan, peternakan dan perdagangan internasional⁵.

Pasca reformasi kondisi perekonomian provinsi Jambi sangat memprihatinkan, di mana pada masa itu perekonomian Jambi masih terbelenggu dengan krisis moneter sehingga menyebabkan harga-harga sembako melonjak tinggi dan membuat masyarakat kesusahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sedangkan dalam bidang pendidikan, Masalah pendidikan dasar di Provinsi Jambi sangat memilukan sekaligus memprihatinkan, akibat hampir 400 dari sekitar 2.000 gedung sekolah dasar (SD) yang ada memiliki kondisi tidak

⁵ http://kbriyangon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=120, Embassy of The Republic of Indonesia Yangon Myanmar, Pariwisata Provinsi Jambi, diakses pada tanggal 18 September 2014.

layak pakai karena rusak berat. Kerusakan yang dialami berupa Atap bocor, dinding lusuh, semen lantai kelas sudah terkelupas tinggal tanah, pekarangan becek dan rusak menjadi pemandangan biasa. Hewan ternak bukan hanya leluasa masuk pekarangan sekolah, tetapi juga hingga ke ruang kelas. SD-SD yang tidak layak pakai tersebut tersebar di berbagai kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Batanghari, Sarolangun, Merangin, Bungo, Tebo, Kerinci, dan Kota Jambi. Namun, karena perbaikan atau rehabilitasi tidak dilakukan akibat ketiadaan dana, sekolah yang sudah tidak layak pakai masih digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar⁶.

Di samping itu, infrastruktur jalan dan jembatan yang memiliki peran strategis dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan hankam di daerah provinsi Jambi juga memprihatinkan, di mana jalan-jalan lintas sumatera tersebut memiliki kerusakan cukup serius, banyaknya lubang di jalan-jalan, tidak sedikitnya jalan yang masih tanah sehingga pada musim penghujan membuat masyarakat setempat kesusahan dalam beraktivitas karena jalan yang becek dan susah untuk menjalankan alat transportasi, bahkan sebagian daerah masih menggunakan jembatan gantung yang terbuat dari bahan seadanya seperti tali tambang dan kayu.

Perkembangan realisasi investasi perusahaan PMDN mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2006 realisasi total mencapai Rp.9,128 trilyun akan tetapi pada

6

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CD8QFjAE&url=http%3A%2F%2Fperpustakaan.bappenas.go.id%2Ffontar%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2Fblob%2FF6333%2FMemilukan.htm&ei=mnU5Vd2rF9Xe8AWVpIH4DQ&usg=AFQjCNHy2xWceR15cBBAQMmQYhSumGc0Qw&sig2=H5BSO_7LqUlo5AkJpGJ-wA&bvm=bv.91427555,d.dGc, Memilukan, Kondisi Sarana dan Prasarana SD di Jambi, diakses pada tanggal 24 April 2015

tahun 2009 menurun menjadi Rp.9,05 triliun hal ini disebabkan karena ada perusahaan PMDN yang beralih status ke PMA selain itu adanya pengaruh krisis keuangan global serta banyaknya industry di sektor perkayuan yang macet/tutup karena kesulitan bahan baku. Untuk nilai realisasi investasi PMA yang menggunakan dana rupiah terjadi peningkatan dari total Rp.1,12 triliun tahun 2006 menjadi Rp.2,21 triliun tahun 2009. Sedangkan investasi PMA dalam dolar Amerika Serikat juga terjadi peningkatan dimana tahun 2006 sebesar US \$ 18,23 juta meningkat menjadi US \$ 20,65 juta pada tahun 2009⁷.

Dalam periode pemerintahannya tahun 2005-2010 pemerintah provinsi Jambi menempatkan infrastruktur sebagai prioritas utama. APBD Pemerintah Daerah Provinsi Jambi tahun 2007, mengalokasikan anggaran Rp212,5 miliar untuk perbaikan jalan, Hasilnya, kondisi ruas jalan di Jambi semakin mulus. Membangunan infrastruktur membutuhkan biaya yang cukup besar. Bahkan, walaupun Pemprov Jambi telah mengalokasikan anggaran APBD yang cukup besar tetap saja masih ada kekurangan dalam membenahi seluruh infrastruktur yang ada. di samping itu jembatan Batang Hari II juga menjadi prioritas pemerintah dalam membenahan infrastruktur yang ada di provinsi Jambi, karena memiliki nilai strategis ekonomi yang tinggi, dapat menjadi penunjang urat nadi perekonomian di daerah jambi. Dengan selesainya pembangunan Jembatan Batanghari II, jarak tempuh antara Kabupaten Kerinci yang merupakan sentra komoditi pertanian menuju Pelabuhan Muara Sabak lebih dekat.

⁷ <http://jambiprov.go.id/images/renstra/RENSTRA%20BPMD%20DAN%20PPT.pdf>, Restra BPMD dan PPT Jambi

Jarak wilayah Muara Sabak, sebagai pintu gerbang ekspor Provinsi Jambi hanya 414, 15 kilometer, atau cukup ditempuh hanya 8 jam saja. Sebelumnya berjarak 548,03 kilometer, dengan ditempuh perjalanan 12 jam. Seluruh komoditi ekspor pertanian yang dihasilkan petani di Kabupaten Kerinci serta komoditi ekspor lainnya yang dihasilkan daerah lain di Provinsi Jambi, tidak perlu lagi harus mempergunakan Pelabuhan Teluk Bayur di Sumatera Barat sebagai pintu gerbang ekspor, Sebab, akan merugikan terhadap pemasukan PAD daerah jika tetap menjadikan Pelabuhan Teluk Bayur sebagai pintu gerbang ekspor komoditi yang dihasilkan Provinsi Jambi. Pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan Jembatan Batanghari II, pembangunan terhadap ruas jalan, dan termasuk pula terhadap pembangunan PLTA di Kabupaten Kerinci, merupakan upaya pemerintah provinsi Jambi untuk mendongkrak perekonomian masyarakat yang akhirnya membuahkan kesejahteraan yang dinikmati seluruh masyarakat⁸.

Dalam 5 tahun periode kepemimpinannya tahun 2005-2010, Pemda Jambi berupaya melakukan akselerasi pembangunan daerah yang difokuskan untuk mencapai peningkatan kualitas pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja yang berbasis pada sektor pertanian yang merupakan 'resource endowment' Provinsi Jambi, sehingga mampu meningkatkan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tahun 2004, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jambi mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari 15,5 triliun menjadi 18,7 triliun pada tahun 2005. Share terbesar didominasi oleh sektor pertanian yang memberi kontribusi sebesar 30,2 %. Namun, Potensi tersebut belum

⁸ <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=32353>, Harian Umum Pelita: Meningkatkan Infrastruktur Karena Urat Nadi Perekonomian (Nusantara), diakses pada tanggal 24 April 2015

dikelola secara optimal, sehingga belum mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan Jambi⁹.

Data terakhir pada tahun 2010 menunjukkan bahwa sebagaimana diketahui, perekonomian Provinsi Jambi sangat ditopang oleh sektor pertanian yang kontribusinya terhadap PDRB mencapai 30%, yaitu mencapai Rp 15 triliun dari total PDRB Jambi sebesar Rp 53.8 triliun. industri Pertambangan mempunyai kontribusi yang cukup besar juga, yaitu di kisaran 18%. industri Pertambangan mencapai Rp 9,7 triliun, sementara industri pengolahan berkontribusi hampir sebesar Rp 6 triliun¹⁰.

Kondisi perekonomian di provinsi Jambi semakin mengalami peningkatan pada priode pemerintahan selanjutnya tahun 2011-2014, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jambi menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dengan migas tahun 2012 mencapai 72.654 miliar rupiah meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. PDRB ADHB dengan migas Provinsi Jambi menyumbang sebesar 1,08 persen terhadap PDB nasional (33 provinsi).

Struktur perekonomian Provinsi Jambi tahun 2011, didominasi besarnya kontribusi sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 29,35%, sektor pertambangan (19,07%), dan sektor industri pengolahan (10,67%). Selain ketiga sektor diatas, sektor lainnya yang memiliki kontribusi cukup besar adalah sektor industri pengolahan (10,67%), dan sektor jasa (9,33%).

⁹ http://jambiprov.go.id/images/ragam/masterplan/laporan_antara_bab_1.pdf, pendahuluan, diakses pada Tanggal 24 April 2015

¹⁰ <http://www.djpk.depkeu.go.id/attachments/article/257/05.%20JAMBI.pdf>, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, diakses pada tanggal 24 April 2015

Jika dilihat perbandingan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dengan migas 2011 kabupaten/kota di Provinsi Jambi, menunjukkan adanya kesenjangan pendapatan yang cukup tinggi, dimana PDRB tertinggi mencapai Rp 10.566 miliar (Kota Jambi) dan PDRB terendah sebesar Rp 3.095 miliar (Kabupaten Tebo).

Perkembangan ekonomi Jambi dalam tiga tahun terakhir mengalami percepatan, namun belum signifikan. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2012 mencapai 7,44% lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara untuk pertumbuhan sektor-sektor, seluruh sektor tumbuh positif pada tahun 2011 dan sektor dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi serta sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi Jambi adalah: sektor pertambangan (23,10%), sektor listrik, gas dan air bersih (11,27%), dan sektor keuangan (9,08%).

Sementara untuk pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota, seluruh kabupaten/kota rata-rata tumbuh positif, dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kabupaten Sarolangun dengan laju pertumbuhan sebesar 8,80%, dan pertumbuhan terendah di Kabupaten Kerinci dengan laju pertumbuhan sebesar 5,69% dan Kabupaten Tebo dengan laju pertumbuhan ekonomi 6,78%.

PDRB perkapita dengan migas ADHB Provinsi Jambi dan kabupaten/kota dari tahun 2005-2012 meningkat setiap tahunnya, PDRB perkapita tahun 2012 Jambi mencapai sebesar 22.405 ribu/jiwa lebih rendah dari PDRB perkapita nasional (33.748 ribu/jiwa). Sementara untuk perbandingan PDRB perkapita kabupaten/kota di Jambi kecenderungan adanya kesenjangan yang cukup tinggi,

dimana sebagian besar kabupaten/kota memiliki PDRB perkapita di bawah rata-rata PDRB perkapita provinsi, dengan PDRB perkapita tertinggi mencapai 49.387 ribu/jiwa terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan terendah sebesar 10.140 ribu/jiwa di Kabupaten Tebo¹¹.

Perkembangan kondisi pendidikan menurut indikator Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS), secara umum kondisi pendidikan di Provinsi Jambi menunjukkan perbaikan dalam lima tahun terakhir (2005-2011). AMH Provinsi Jambi tahun 2011 sebesar 96,16 persen lebih tinggi dari AMH nasional (92,99%), dengan AMH tertinggi di Kota Jambi (99,07%) dan terendah di Tanjung Jabung Timur (92,44%).

Indikator pendidikan menurut RLP, RLS Provinsi Jambi tahun 2011 mencapai 8,05 tahun berada diatas RLS nasional. Sementara untuk perbandingan RLS antar kabupaten/kota, RLS tertinggi terdapat di Kota Jambi (10,37 tahun) dan terendah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (6,30 tahun)¹².

Perkembangan realisasi investasi PMA Provinsi Jambi dalam tiga tahun terkahir (2010-2012) cenderung meningkat namun belum signifikan. Nilai realisasi investasi PMA tahun 2012 tercatat sekitar 156,32 juta US\$ lebih tinggi dibandingkan PMA tahun 2011 (19,47 juta US\$) atau sekitar 0,10 persen dari total PMA nasional dengan jumlah proyek sebanyak 30 proyek. Sebaliknya untuk

¹¹

<http://simreg.bappenas.go.id/document/Profil/Profil%20Pembangunan%20Provinsi%201500Jambi%202013.pdf>, Profil Pembangunan Jambi, diakses pada tanggal 20 Oktober 2014.

¹²

<http://simreg.bappenas.go.id/document/Profil/Profil%20Pembangunan%20Provinsi%201500Jambi%202013.pdf>, Profil Pembangunan Jambi 2013, diakses pada 24 April 2015

perkembangan realisasi investasi PMDN cenderung menurun, nilai realisasi investasi PMDN tahun 2012 mencapai 1.445,68 menurun dibandingkan PMDN tahun 2011¹³.

Dengan sumber daya alam yang dimiliki, provinsi Jambi masih sangat sulit untuk menarik para investor baik investor asing PMA dan investor dalam negeri PMDN. Hal ini terjadi karena upaya pembangunan daerah di Propinsi Jambi dihadapkan kepada berbagai kendala yang erat kaitannya dengan kondisi geografis dengan karakteristik fisik wilayah yang terdiri atas kawasan rawan bencana, daerah terpencil yang sukar untuk dicapai serta adanya lahan yang kurang subur, yang sulit dipergunakan sebagai lahan produktif dan bagi pengembangan prasarana dan sarana, antara lain pengembangan sistem transportasi.

Selain itu, propinsi Jambi mempunyai jumlah penduduk yang relatif sedikit dibandingkan dengan luas wilayah secara keseluruhan. Jumlah penduduk yang relatif sedikit dengan persebaran yang tidak merata dan terpencar dalam kelompok penduduk yang kecil di beberapa kawasan terpencil dan terisolasi, terutama di bagian timur dan bagian tengah, merupakan kendala pula dalam meningkatkan penyebaran kegiatan ekonomi dan dalam melayani kebutuhan dasar masyarakat¹⁴.

13

<http://simreg.bappenas.go.id/document/Profil/Profil%20Pembangunan%20Provinsi%201500Jambi%202013.pdf>, Profil Pembangunan Jambi, diakses pada tanggal 18 September 2014

14

http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDEQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.bappenas.go.id%2Findex.php%2Fdownload_file%2Fview%2F8753%2F1732%2F&ei=vUZVKCbLcS0uASO-4BY&usg=AFQjCNECRODkTNbX-P3yXGuGtLI-1wj5VQ&sig2=owz_6Y-AHtNrQGczPE14g&bvm=bv.75097201,d.c2E, Pembangunan Daerah Tingkat I, 5. Jambi, diakses pada tanggal 18 September 2014

Pengembangan investasi yang belum berbasis pada kemampuan penguasaan teknologi dan masih rendahnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) mengakibatkan implikasi yang tidak ringan bagi pertumbuhan iklim investasi di provinsi Jambi. Rencana strategi (RENSTRA) kegiatan pembangunan pada BKPM Provinsi Jambi ditingkatkan pelaksanaan kegiatan adalah kegiatan Prioritas Pembangunan yang memperhatikan Sumber daya alam, Sumber daya manusia yang berwawasan lingkungan dengan penjabaran kebijakan program pembangunan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, maka rencana implementasi strategi secara efektif dan efisien dilaksanakan secara berkesinambungan untuk pada setiap tahun anggaran pembangunan.

1.2 POKOK PERMASALAHAN

Dengan peraturan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan strategi dan segala upaya yang sekarang ini telah dilakukan oleh pemerintah provinsi Jambi diharapkan akan dapat mempercepat laju pertumbuhan dan pembangunan daerah sehingga dapat tercipta kemakmuran dan kesejahteraan terhadap masyarakat provinsi Jambi karena di daerah yang memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam yang mereka miliki, serta memiliki kewenangan yang memadai untuk menggali sumber daya keuangan sendiri dengan adanya kebijakan dari pemerintah daerah provinsi Jambi. Dari latar belakang masalah di atas dapat ditarik sebuah rumusan masalah

yaitu: “*Bagaiman Strategi Pemerintah Provinsi Jambi dalam Meningkatkan Investasi Asing Pada Tahun 2011-2014?*”

1.3 KERANGKA DASAR PEMIKIRAN

Untuk menjawab permasalahan yang tersebut di atas, penulis memerlukan kerangka dasar pemikiran. Kerangka dasar pemikiran ini digunakan sebagai landasan teoritis yang relevan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis, penulis menggunakan konsep Paradiplomasi dan konsep penanaman modal untuk melihat upaya pemerintah provinsi Jambi dalam menarik investor asing di era globalisasi.

1.3.1 KONSEP PARADIPLMACY

Paradiplomasi secara relative masih merupakan fenomena baru bagi aktivitas pemerintahan di Indonesia. Paradiplomasi mengacu pada perilaku dan kapasitas untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas ‘*sub-state*’, atau pemerintah regional/pemda, dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik. Istilah ‘*paradiplomacy*’ kali pertama diluncurkan dalam perdebatan akademik oleh ilmuwan asal Basque, Panayotis Soldatos tahun 1980-an sebagai penggabungan istilah ‘*parallel-diplomacy*’ menjadi ‘*paradiplomacy*’, yang mengacu pada makna ‘*the foreign policy of non-central governments*’, menurut Aldecoa, Keating and Boyer. Istilah lain yang pernah dilontarkan oleh Ivo Duchacek (New York, tahun 1990) untuk konsep ini adalah ‘*micro-diplomacy*’.

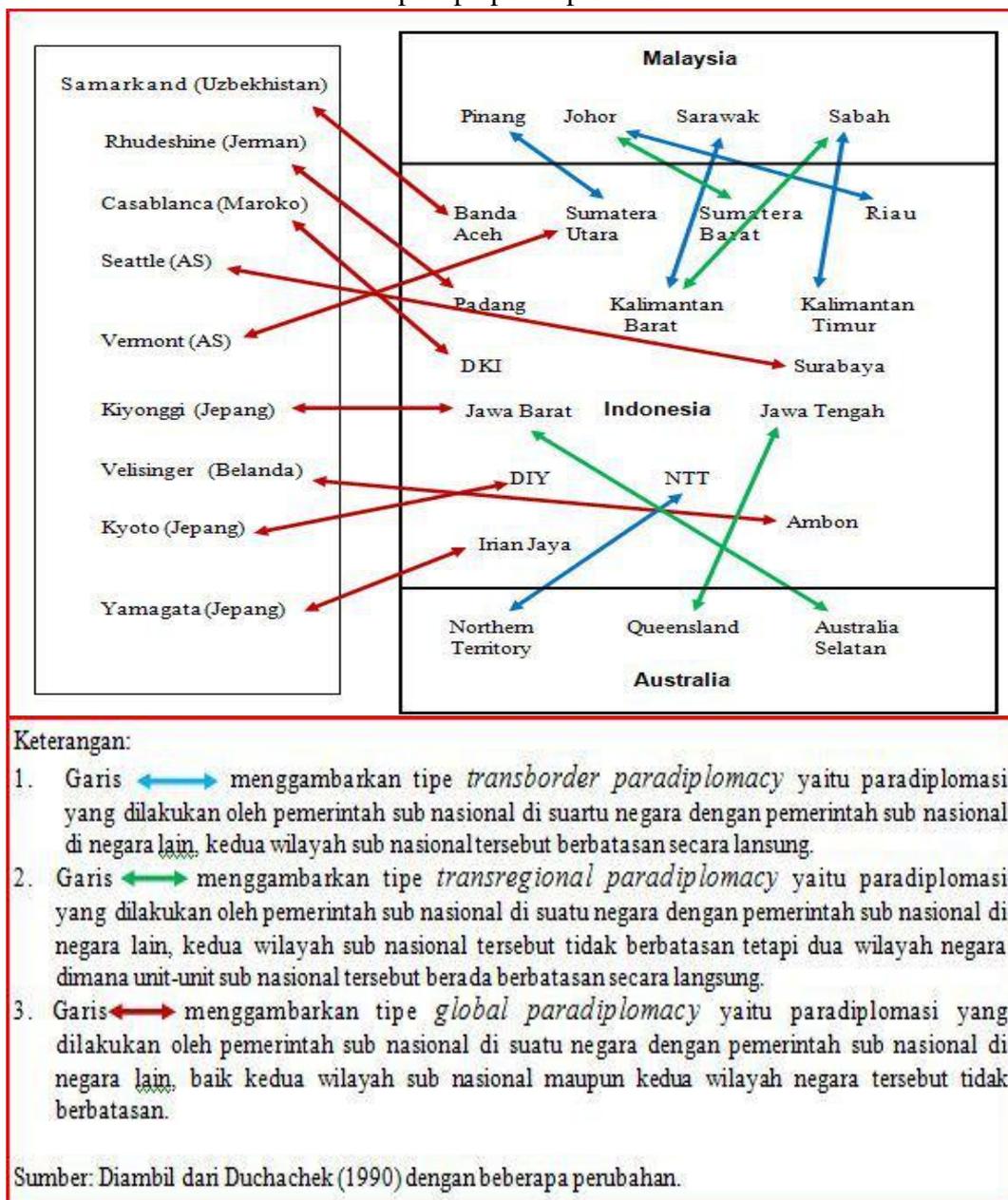
Paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah sub nasional dapat mengambil berbagai bentuk. Sedikitnya terdapat enam sarana yang dapat dipergunakan sebagaimana diidentifikasi oleh Duchachek. Penggunaan sarana ini sekaligus merupakan upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan kepentingan mereka di arena internasional. Cara-cara tersebut mencakup pendirian kantor-kantor perwakilan (*permanent offices*) di negara-negara lain terutama di pusat-pusat perdagangan dan keuangan dunia, pertukaran kunjungan pejabat-pejabat pemerintah sub nasional di satu negara dengan pejabat-pejabat pemerintah sub nasional di negara lainnya, pengiriman misi-misi teknik, promosi dagang dan investasi, pembentukan *foreign trade zone* seperti yang dilakukan oleh 30 negara bagian di Amerika Serikat. Upaya lainnya adalah berpartisipasi dalam organisasi-organisasi atau konferensi-konferensi internasional. Sebagai contoh keikutsertaan Quebec dalam delegasi Kanada pada KTT Francophone dan keikutsertaan Pemerintah Tyrol dalam delegasi Austria pada konferensi PBB mengenai wilayah Tyrol Selatan tahun 1960-1962.

Berpijak pada aspek geografis atau kerangka kewilayahan, Duchachek membagi paradiplomasi menjadi tiga tipe. Tipe pertama adalah *transborder paradiplomacy*. Tipe paradiplomasi ini menunjuk pada hubungan institusional, formal atau pun informal oleh pemerintah-pemerintah sub nasional yang berbeda negara namun secara geografis wilayah-wilayah sub nasional tersebut berbatasan langsung. Tipe paradiplomasi yang kedua, *transregional paradiplomacy*, hubungan diplomasi yang dilakukan antara dua atau lebih pemerintah sub nasional yang wilayahnya tidak berbatasan secara langsung namun negara di mana unit-unit sub

nasional tersebut berada berbatasan secara langsung. Sedangkan tipe ketiga adalah *global paradiplomacy* yang merupakan aktifitas hubungan antara pemerintah-pemerintah sub nasional di dua atau lebih negara yang tidak berbatasan. Ketiga tipe tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1.1

Tipe-tipe paradiplomasi



Sementara itu, Soldatos (1990), secara fungsional atau berdasarkan cakupan isu dalam paradiplomasi, membagi dua tipe paradiplomasi. Tipe pertama adalah *global paradiplomacy*. Dalam tipe ini pemerintah sub nasional terlibat dalam isu-isu global atau isu-isu politik tingkat tinggi. Sebagai contoh tipe paradiplomasi ini adalah kebijaksanaan yang diambil Gubernur New York dan Gubernur New Jersey yang melarang pendaratan pesawat-pesawat Uni Soviet di wilayahnya sebagai reaksi atas penembakan pesawat Korean Airlines. Mengingat pemerintah sub nasional biasanya terlibat dalam isu-isu politik tingkat rendah, tipe paradiplomasi ini relatif jarang terjadi. Tipe kedua klasifikasi Soldatos adalah *regional paradiplomacy*. Dalam tipe ini pemerintah sub nasional terlibat pada isu-isu yang berskala regional. Apabila isu-isu tersebut menyangkut komunitas yang secara geografis berbatasan langsung (*geographical contiguity*), Soldatos menyebutnya sebagai *macroregional paradiplomacy* sebaliknya bila komunitas tersebut tidak berbatasan secara langsung disebutnya sebagai *microregional paradiplomacy*. Lazimnya regional paradiplomacy ini menyangkut isu-isu politik tingkat rendah sehingga jarang menimbulkan kontroversi.

Dorongan bagi pemerintah sub nasional untuk melakukan paradiplomasi dapat berasal dari lingkungan domestik baik dari negara maupun unit sub nasional itu sendiri, dan dari faktor-faktor eksternal/internasional. Faktor-faktor yang menjadi pendorong paradiplomasi meliputi:

1. Dorongan (upaya-upaya) segmentasi baik atas dasar objektif (*objective segmentation*) antara lain didasari perbedaan geografi, budaya, bahasa,

agama, politik dan faktor-faktor lain yang secara objektif berbeda dengan wilayah lain di negara tempat unit sub nasional tersebut berada maupun atas dasar persepsi (*perceptual segmentation* atau *electoralism*) yang meskipun terkait dengan *objective segmentation* namun lebih banyak didorong oleh faktor-faktor politik.

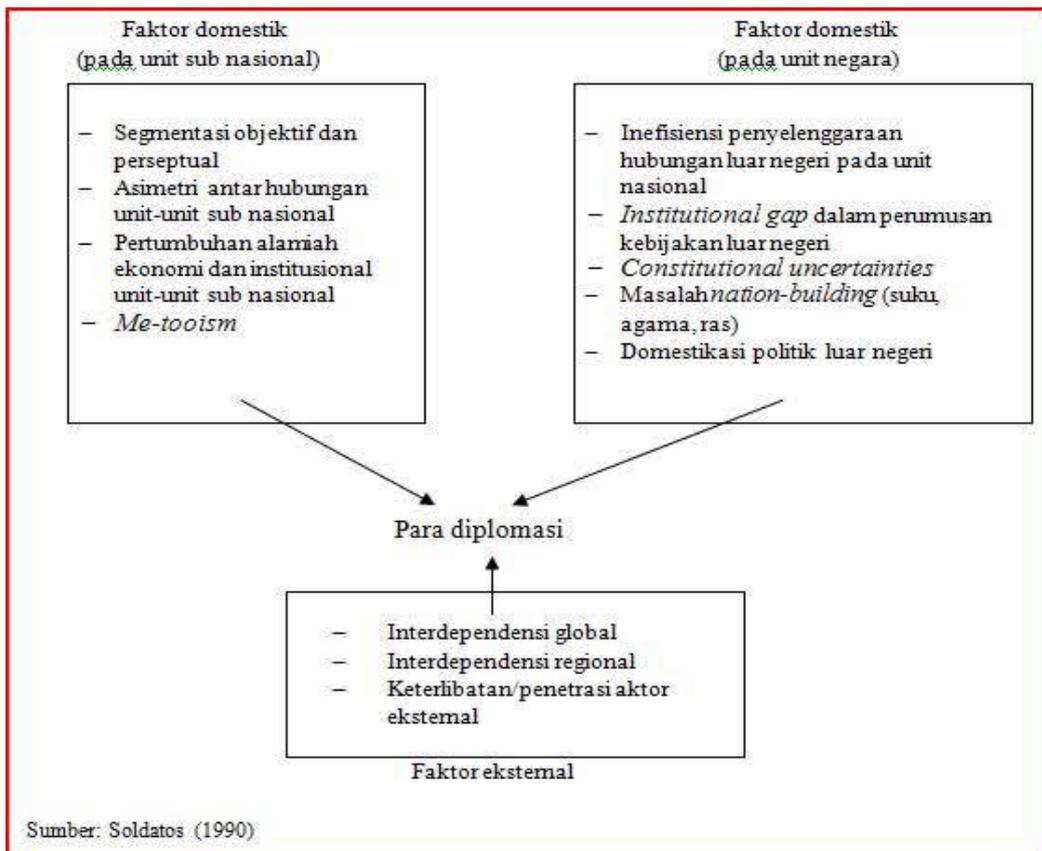
2. Adanya ketidakseimbangan keterwakilan unit-unit sub nasional pada unit nasional dalam hubungan luar negeri (*asymmetry of federated/sub national units*).
3. Perkembangan ekonomi dan institusional yang alamiah pada unit sub nasional mampu mendorong pemerintah sub nasional untuk “melakukan ekspansi” perannya.
4. Kegiatan para diplomasi juga bisa dilatarbelakangi oleh gejala “me-tooism” yang secara mudah dapat diartikan mengikuti hal-hal yang dilakukan unit sub nasional lainnya.
5. Adanya *institutional gap* dalam perumusan kebijakan hubungan luar negeri dan inefisiensi pelaksanaan hubungan luar negeri pada pemerintahan nasional.
6. Masalah-masalah yang terkait dengan *nation-building* dan konstitusional (*constitutional uncertainties*) juga dapat mendorong pemerintah sub nasional melakukan paradiplomasi sebagaimana krisis yang dialami Pemerintah Propinsi Quebec di Kanada.
7. Domestikasi politik luar negeri sebagai dampak dari mengemukanya isu-isu politik tingkat rendah telah memotivasi pemerintah sub nasional yang

mempunyai kepentingan (*vested systemic interest*) dan kompetensi konstitusional untuk melakukan paradiplomasi.

Penetrasi internasional atau intervensi dari aktor-aktor eksternal dalam isu-isu domestik yang dimotivasi kepentingan strategis politik, ekonomi, sentimen budaya dan agama, serta interdependensi global dan regional (dalam kasus *transborder* dan *transregional paradiplomacy*) dapat menjadi pendorong pemerintah sub nasional untuk melakukan paradiplomasi. Interdependensi global khususnya antar negara industri maju membawa dampak ganda pada negara-negara berdaulat. Interdependensi telah membuka peluang adanya penetrasi kedaulatan dimana batas-batas teritorial negara tidak mampu lagi secara efektif membendung pengaruh-pengaruh eksternal di bidang ekonomi, budaya dan isu-isu politik tingkat rendah terhadap unit-unit sub nasional di wilayahnya. Pada sisi lain interdependensi global mendorong pemerintah nasional melakukan sentralisasi dalam kebijakan luar negeri dalam rangka meningkatkan daya tahan dan daya saing. Namun hal ini justru menimbulkan reaksi balik dan resistensi dari unit-unit sub nasional yang tetap berkeinginan mempertahankan kepentingan dan perannya. Secara ringkas faktor-faktor tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1.2

Faktor-faktor pendorong paradiplomacy



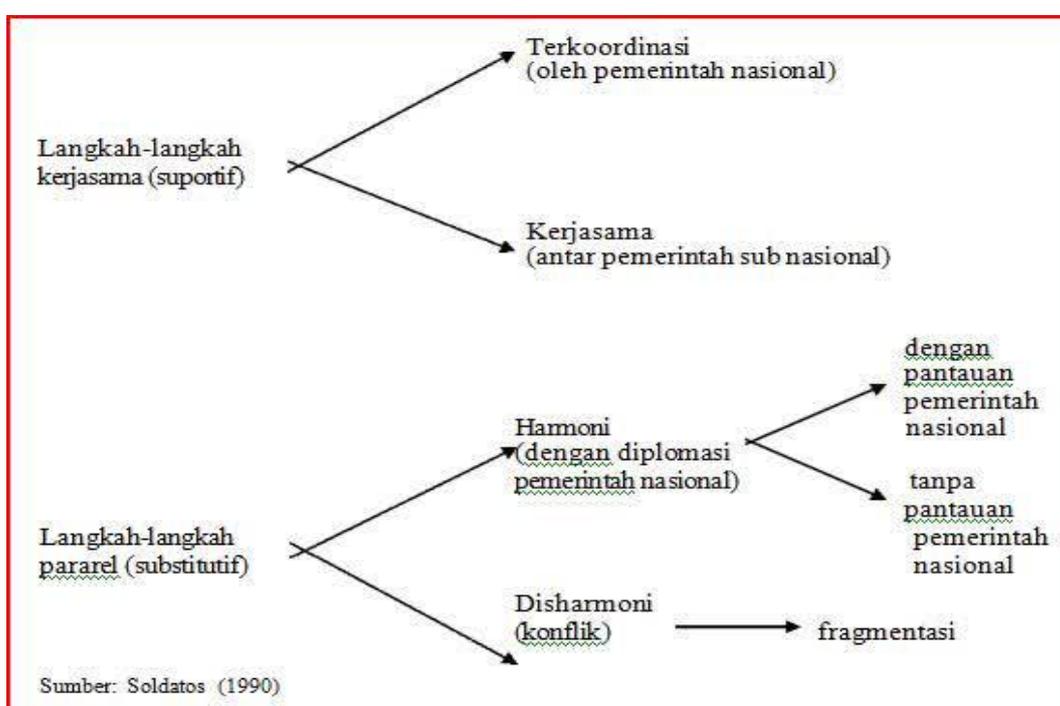
mengarahkan adanya dua kemungkinan yang dapat terjadi dalam hubungan antara paradiplomasi dan makrodiplomasi yakni keduanya dapat berjalan bersesuaian (*in line*) atau sebaliknya saling berlawanan/bertentangan.

Mengenai hal ini Soldatos memberikan dua skenario utama. Pertama, paradiplomasi dan makrodiplomasi berhubungan secara kooperatif artinya paradiplomasi sifatnya suportif (mendukung makrodiplomasi). Kedua, paradiplomasi berjalan paralel dengan makrodiplomasi dan sifat paradiplomasi adalah substitutif atau pelengkap makrodiplomasi. Hubungan yang bersifat kooperatif dapat berlangsung bila pelaksanaan diplomasi oleh pemerintah sub nasional dikoordinasi oleh pemerintah nasional atau terdapat kerjasama antarpemerintah sub nasional. Sementara dalam hubungan yang sifatnya substitutif

ada dua kemungkinan yang dapat terjadi yaitu hubungan yang serasi (*in harmony*) atau sebaliknya konfliktual (*disharmony*) yang pada akhirnya memunculkan fragmentasi. Gambar berikut ini menunjukkan pola-pola hubungan antara paradiplomasi dan makrodiplomasi¹⁵.

Gambar 1.3

Pola hubungan paradiplomacy dan makrodiplomasi



Konsep paradiplomasi di Indonesia dalam kewenangan melakukan kerja sama internasional dengan para investor asing dalam konteks UU No. 32 Tahun 2004, masuk dalam kategori kewenangan Tidak Wajib bagi Daerah. Meskipun kewenangan melakukan hubungan internasional ini bersifat tidak wajib, namun dalam praktik pemerintahan di daerah telah menjadi sebuah keniscayaan karena

¹⁵ Paradiplomasi dalam politik luar negeri Indonesia, <http://godedehead.wordpress.com/2009/12/16/paradiplomasi-dalam-politik-luar-negeri-indonesia/>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2014

arus globalisasi dunia yang telah merambah ke seluruh pelosok nusantara. Pemda selaku pelaksana pemerintahan yang juga pengambil keputusan dalam kebijakan public yang strategis seperti investasi dan perdagangan, akan sangat ketinggalan apabila tidak membaur ke dalam pergaulan masyarakat internasional. Daerah yang tidak terampil dalam pergaulan dunia pasti akan ketinggalan, sebab daerah itu hanya akan menjadi konsumen pasif saja dari seluruh proses perdagangan dunia atau kapitalisme global¹⁶.

Konsep Paradiplomasi di sini digunakan untuk menjelaskan hubungan kerjasama internasional yang terjalin antara pemerintah provinsi Jambi dengan para investor asing. Namun, sebelum pelaksanaan kerjasama internasional tersebut DPRD dan pemerintah pusat wajib mengetahui program-program apa saja yang akan diajukan oleh pemerintah daerah provinsi Jambi dan pihak asing, sehingga pemerintah dapat melegalkan perizinan dalam pelaksanaan kerjasama internasional tersebut.

Disamping itu, konsep paradiplomasi digunakan untuk mencapai kepentingan daerah provinsi Jambi. Kepentingan ini berupa pencapaian peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memberi informasi tentang sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengenai lingkungan dan budaya yang ada di provinsi Jambi, melalui pertukaran kunjungan pejabat-pejabat pemerintah sub nasional di satu negara dengan pejabat-pejabat pemerintah sub nasional di negara lainnya, pengiriman misi-misi teknik, promosi dagang dan investasi, upaya

¹⁶ Mukti, Takdir Ali, *'Paradiplomacy;Kerjasama Luar Negeri oleh Pemda di Indonesia'*, hal. 76-77, Yogyakarta, 2013

lainya adalah berpartisipasi dalam organisasi-organisasi atau konferensi-konferensi internasional. upaya ini wajib dilakukan agar nantinya dapat meminimalisasikan terjadinya kerugian sebagai dampak baik dari program-program yang mengalami kendala dan program-program yang gagal dalam pengimplementasiannya. Disamping itu, cara-cara ini harus dilakukan oleh pemda Jambi agar pemda Jambi dan para investor mengetahui bagaimana peluang investasi yang baik dan menguntungkan serta perkembangan yang ada di masing-masing pihak. Sehingga pada akhirnya, kerjasama yang terjalin dapat menguntungkan kedua belah pihak baik dari pihak para investor asing (PMA) dan pihak provinsi Jambi.

1.3.2 TEORI PENANAMAN MODAL

Investasi asing di Indonesia dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu investasi portofolio dan investasi langsung. Investasi portofolio dilakukan melalui pasar modal dengan instrument surat berharga seperti saham dan obligasi. Sedangkan investasi langsung dikenal dengan Penanaman Modal Asing (PMA), merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan¹⁷.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia. Penanaman Modal dalam Negeri adalah kegiatan menanam untuk melakukan usaha di wilayah negara

¹⁷ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23684/5/Chapter%20II.pdf>, Bab II, Tinjauan Pustaka, hal. 1, diakses pada tanggal 31 Oktober 2014

Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah negara republic Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun patungan dengan penanam modal dalam negeri¹⁸.

Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli dalam kaitanya dengan berbagai faktor yang mempengaruhi penanaman modal asing atau investasi asing di suatu negara. Menurut teori Alan M. Rugman, ada dua faktor terpenting yang mempengaruhi penanaman modal asing yaitu variabel lingkungan dan variabel internalisasi¹⁹. Pertama, variabel lingkungan, dalam keputusan mengenai teori perusahaan multinasional, variabel lingkungan sering kali disebut sebagai Keunggulan Spesifik-Negara, KSN, atau faktor spesifik-lokasi; kedua istilah mengacu pada gagasan yang sama. KSN adalah variable yang mempengaruhi bangsa sebagai keseluruhan. Ada tiga jenis variable lingkungan yang menjadi perhatian, diantaranya; ekonomi, non-ekonomi dan pemerintah.

Variable ekonomi menyusun suatu fungsi produksi keseluruhan suatu bangsa, yang didefinisikan meliputi semua masukan faktor yang terdapat di dalam masyarakat. Untuk keperluan penyederhanaan, biasanya dibuat model sebagai tenaga kerja (labor, L) dan modal (K). dalam model yang lebih canggih dapat dimasukkan faktor lain untuk analisis; hal ini mencakup teknologi (TECH),

18

<http://pusdiklat.bkpm.go.id/asset/media/UU%20No%2025%20Tahun%202007%20Ttg%20PM.pdf>,
Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, hal. 2-3,
diakses pada tanggal 30 Oktober 2014

¹⁹ Jatmika, Sidik, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hubungan Internasional*, Yogyakarta, 2001,
hal. 78

tersedianya sumber daya alam (RES), dan keterampilan manajemen (MGMT). Yang tersebut terakhir biasanya disebut sebagai suatu jenis modal manusiawi.

Di samping variable ekonomi, faktor spesifik negara juga meliputi seluruh set variable politik, budaya dan sosial pada setiap bangsa. Pentingnya variable ekonomi ini untuk operasi perusahaan multinasional (MNCs) berbeda dari negara ke negara. Hal ini mengandung arti bahwa sebuah perusahaan multinasional menghadapi kelompok yang berlainan dari kondisi lingkungan, risiko dan kesempatan di setiap negara tempatnya beroperasi.

Dalam kenyataannya, setiap negara sesungguhnya mempunyai set faktor spesifik negara (lokasi) yang khas; tidak ada dua set faktor ekonomi dan non-ekonomi yang identik. Perbedaan dalam berat, atau nilai, yang terkait pada setiap variable berlaku untuk menghasilkan set karakteristik yang khas untuk masing-masing negara. MNCs perlu mengetahui perbedaan semacam itu di antara berbagai bangsa. Sampai batas tertentu, sebuah perusahaan yang terlibat dalam bisnis internasional akan dapat mengadakan generalisasi anatarbudaya, sistem politik, kelompok agama dan nilai sosial untuk meminimumkan biaya tambahan dari penanaman modal asing pada produksi di negara sendiri, tetapi perusahaan itu tidak boleh melupakan sifat khusus dari setiap faktor spesifik negara-bangsa.

Kedua, variabel Internalisasi atau keunggulan spesifik perusahaan. Ini merupakan yang kadang juga disebut sebagai faktor spesifik kepemilikan²⁰.

Dalam Teori Penanaman Modal yang dikemukakan oleh Alan M. Rugman menyatakan bahwa penanam modal asing (PMA) dipengaruhi oleh dua faktor yaitu variabel lingkungan dan variabel internalisasi. Dalam hal ini Propinsi Jambi secara

²⁰ Rugman, Alan .M, *Bisnis Internasional 1*, Jakarta Pusat, 1993, hal. 145-147

umum sebagai tuan rumah (host Country) harus memperhatikan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi penanaman modal asing.

Jadi dengan adanya teori penanaman modal pemerintah Provinsi Jambi diharapkan bisa mengetahui bagaimana cara berinvestasi yang menguntungkan kedua belah pihak, Provinsi Jambi berupaya mencari ciri khas yang membedakan dengan provinsi lain serta upaya meningkatkan daya saing iklim berinvestasi, dan bagaimana cara meningkatkan minat para investor asing agar berkenan menanamkan modalnya di daerah provinsi Jambi.

1.3.3 ANALISIS SWOT

Analisis SWOT adalah analisis kondisi internal maupun eksternal suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Analisis internal meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness). Sementara, analisis eksternal mencakup faktor peluang (Opportunity) dan tantangan (Threats).

Ada dua macam pendekatan dalam analisis SWOT, yaitu:

1. Pendekatan Kualitatif Matriks SWOT

Pendekatan kualitatif matriks SWOT sebagaimana dikembangkan oleh Kearns menampilkan delapan kotak, yaitu dua paling atas adalah kotak faktor eksternal (Peluang dan Tantangan) sedangkan dua kotak sebelah kiri adalah faktor internal (Kekuatan dan Kelemahan). Empat kotak lainnya merupakan kotak isu-isu strategis yang timbul sebagai hasil titik pertemuan antara faktor-faktor internal dan eksternal.

Tabel 1.1

Matriks SWOT Kearns

Internal \ Eksternal	Opportunity	Treaths
Strength	Comparative Advantage	Mobilization
Weakness	Divestmesnt/Investment	Damage Control

Sumber: Hisyam, 1998

Keterangan:

Sel A: *Comparative Advantages* Sel ini merupakan pertemuan dua elemen kekuatan dan peluang sehingga memberikan kemungkinan bagi suatu organisasi untuk bisa berkembang lebih cepat.

Sel B: *Mobilization* Sel ini merupakan interaksi antara ancaman dan kekuatan. Di sini harus dilakukan upaya mobilisasi sumber daya yang merupakan kekuatan organisasi untuk memperlunak ancaman dari luar tersebut, bahkan kemudian merubah ancaman itu menjadi sebuah peluang.

Sel C: *Divestment/Investment* Sel ini merupakan interaksi antara kelemahan organisasi dan peluang dari luar. Situasi seperti ini memberikan suatu pilihan pada situasi yang kabur. Peluang yang tersedia sangat meyakinkan namun tidak dapat dimanfaatkan karena kekuatan yang ada tidak cukup untuk menggarapnya. Pilihan keputusan yang diambil adalah (melepas peluang yang ada untuk dimanfaatkan organisasi lain) atau memaksakan menggarap peluang itu (investasi).

Sel D: *Damage Control* Sel ini merupakan kondisi yang paling lemah dari semua sel karena merupakan pertemuan antara kelemahan organisasi dengan ancaman dari luar, dan karenanya keputusan yang salah akan membawa bencana yang besar bagi

organisasi. Strategi yang harus diambil adalah *Damage Control* (mengendalikan kerugian) sehingga tidak menjadi lebih parah dari yang diperkirakan.

2. Pendekatan Kuantitatif Analisis SWOT

Data SWOT kualitatif di atas dapat dikembangkan secara kuantitatif melalui perhitungan Analisis SWOT yang dikembangkan oleh Pearce dan Robinson (1998) agar diketahui secara pasti posisi organisasi yang sesungguhnya. Perhitungan yang dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:

1. Melakukan perhitungan skor (a) dan bobot (b) point faktor serta jumlah total perkalian skor dan bobot ($c = a \times b$) pada setiap faktor S-W-O-T; Menghitung skor (a) masing-masing point faktor dilakukan secara saling bebas (penilaian terhadap sebuah point faktor tidak boleh dipengaruhi atau mempengaruhi penilaian terhadap point faktor lainnya. Pilihan rentang besaran skor sangat menentukan akurasi penilaian namun yang lazim digunakan adalah dari 1 sampai 10, dengan asumsi nilai 1 berarti skor yang paling rendah dan 10 berarti skor yang paling tinggi. Perhitungan bobot (b) masing-masing point faktor dilaksanakan secara saling ketergantungan. Artinya, penilaian terhadap satu point faktor adalah dengan membandingkan tingkat kepentingannya dengan point faktor lainnya. Sehingga formulasi perhitungannya adalah nilai yang telah didapat (rentang nilainya sama dengan banyaknya point faktor) dibagi dengan banyaknya jumlah point faktor).
2. Melakukan pengurangan antara jumlah total faktor S dengan W (d) dan faktor O dengan T (e); Perolehan angka ($d = x$) selanjutnya menjadi nilai

atau titik pada sumbu X, sementara perolehan angka ($e = y$) selanjutnya menjadi nilai atau titik pada sumbu Y;

3. Mencari posisi organisasi yang ditunjukkan oleh titik (x,y) pada kuadran SWOT.

Tabel 1.2

Pendekatan SWOT Kualitatif

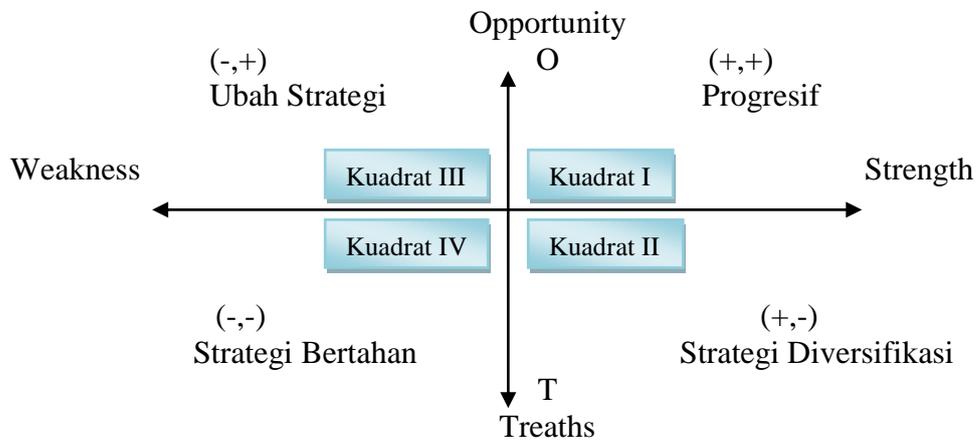
No	Strength	Skor	Bobot	Total
1				
2	dst			
	Total kekuatan			
No	Weakness	Skor	Bobot	Total
1				
2				
	Total kelemahan			
Selisih Total Kekuatan – Total Kelemahan = $S - W = x$				

No	Opportunity	Skor	Bobot	Total
1				
2	Dst			
	Total peluang			
No	Treaths	Skor	Bobot	Total

1				
2	Dst			
	Total tantangan			
Selisih Total Peluang – Total Tantangan = O – T = y				

Gambar 1.4

Pendekatan Kuantitatif Analisis SWOT



Kuadran I (positif, positif)

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat dan berpeluang, Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Progresif, artinya organisasi dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal.

Kuadran II (positif, negatif)

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat namun menghadapi tantangan yang besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Diversifikasi Strategi, artinya organisasi dalam kondisi mantap namun menghadapi sejumlah

tantangan berat sehingga diperkirakan roda organisasi akan mengalami kesulitan untuk terus berputar bila hanya bertumpu pada strategi sebelumnya. Oleh karena, organisasi disarankan untuk segera memperbanyak ragam strategi taktisnya.

Kuadran III (negatif, positif)

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah namun sangat berpeluang. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Ubah Strategi, artinya organisasi disarankan untuk mengubah strategi sebelumnya. Sebab, strategi yang lama dikhawatirkan sulit untuk dapat menangkap peluang yang ada sekaligus memperbaiki kinerja organisasi.

Kuadran IV (negatif, negatif)

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah dan menghadapi tantangan besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Strategi Bertahan, artinya kondisi internal organisasi berada pada pilihan dilematis. Oleh karenanya organisasi disarankan untuk menggunakan strategi bertahan, mengendalikan kinerja internal agar tidak semakin terperosok. Strategi ini dipertahankan sambil terus berupaya membenahi diri²¹.

Dengan analisis SWOT tersebut dapat dilihat bagaimana pemerintah provinsi Jambi dalam strategi eksternal dalam mengatasi peluang dan ancaman, serta khususnya pada strategi internal dalam mengatasi kelemahan dan meningkatkan kekuatan agar pemerintah daerah Provinsi Jambi dapat meningkatkan investasi asing yang ada di Jambi.

²¹ http://daps.bps.go.id/file_artikel/66/Analisis%20SWOT.pdf, Analisis SWOT, diakses pada tanggal 02 Mei 2015

Provinsi Jambi memiliki sumber kekuatan yang seharusnya dapat lebih ditingkatkan salah satunya pada pengelolaan pengolahan dan ketersediaan sumber daya alam yang potensial berupa hutan, lahan pertanian, pangan dan hortikultural, perkebunan dan peternakan, bahan tambang, serta potensi pariwisata baik wisata alam maupun wisata budaya.

Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi pariwisata yang berbeda-beda, baik itu wisata alam dan budaya serta adat istiadatnya, seperti Jambi yang memiliki berbagai suku antara lain: Melayu, Kerinci, Bugis Banjar, Jawa, Sunda dan Kubu. Untuk dapat menggerakkan roda pembangunan secara mandiri dan efisien, tentunya diperlukan daya dukung sumberdaya alam yang memadai. Dengan demikian, dengan potensi sumber daya alam yang ada pemerintah provinsi Jambi harus lebih mampu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang ada di Jambi agar potensial sumberdaya alam yang ada dapat dikembangkan lebih baik kedepannya, sehingga sumber alam ini akan menjadi modal dasar untuk meningkatkan investasi asing di Provinsi Jambi.

1.4 HIPOTESA

Dengan melihat permasalahan yang telah diuraikan di atas dan didukung oleh teori-teori yang dianggap dapat membantu analisa maka penulis mengajukan dugaan sementara atau hipotesa sebagai berikut: Strategi Pemerintah Jambi dalam Meningkatkan Investasi Asing di Era Globalisasi Pada tahun 2009-2014 adalah:

1. Strategi internal dengan meningkatkan anggaran dana dalam upaya pengembangan dan peningkatan pelayanan penanaman modal, peningkatan

pelayanan publik dalam Sarana dan Prasarana Penunjang Program dan Kegiatan penanaman modal, serta Pengembangan SDM baik kualitas maupun kuantitas guna peningkatan produktivitas dan kinerja Aparatur secara optimal.

2. Strategi eksternal dengan menyebarluaskan informasi mengenai provinsi Jambi melalui media massa dan media sosial (internet) dan Mengadakan promosi serta kerja sama baik di dalam negeri dan di luar negeri.

1.5 METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bersifat eksplorasi dengan studi literature. Metode yang bersifat eksplorasi deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan suatu fenomena realitas. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan (*Library Research*). Dalam penyajian data, penulis menggunakan studi literature dalam pengambilan data dari berbagai sumber seperti buku-buku, laporan riset, Koran, situs-situs internet serta berbagai media lainnya yang terkait untuk mendukung penelitian.

1.6 BATASAN PENELITIAN

Pembatasan ruang lingkup penelitian diperlukan untuk mempersempit focus penelitian sehingga penelitian menjadi lebih terarah dan tidak terlalu meluas

pembahasannya. Penulis membatasi penelitian strategi yang dilakuakn pemerintah provinsi Jambi dalam kerjasama luar negeri untuk meningkatkan investasi asing ini dalam sejak tahun 20011-2014.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini akan disusun ke dalam lima bab, yang sistematikanyasebagai berikut:

Bab I: Berisi pendahuluan yang terdiri dari alasan pemilihan judul, tujuan penulisan , latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, metode penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Memaparkan tentang kondisi umum provinsi Jambi yang di dalamnya akan membahas geografis, potensi daerah, visi dan misi pembangunan di provinsi Jambi, juga kondisi investasi asing di provinsi Jambi saat ini, serta landasan hukum investasi yang diterapkan di indonesia.

Bab III: Dalam bab ke tiga ini akan membahas mengenai sejarah investasi, peluang-peluang investasi yang ada di daerah provinsi Jambi, ancaman yang didapat oleh daerah provinsi Jambi dengan adanya investasi asing, faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat investasi yang dihadapi oleh investor asing dan pemerintah provinsi Jambi, serta mengenai investasi asing dan

kerjasama luar negeri apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi Jambi dengan investor-investor asing.

Bab IV: Bab ini akan membahas mengenai bagaimana strategi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Jambi dalam kerjasama luar negeri untuk meningkatkan investasi asing dan pertumbuhan ekonomi di provinsi Jambi yaitu dengan cara Strategi internal dengan meningkatkan pelayanan public, membentuk dan mengembangkan sumber daya manusia berkualitas, dan Strategi eksternal dengan menyebarkan informasi mengenai provinsi Jambi melalui media massa dan media sosial (internet) dan Mengadakan promosi serta kerja sama baik di dalam negeri dan di luar negeri.

Bab V: Dalam Bab ke empat ini akan dibahas mengenai Kesimpulan dan Penutup.